

Strategi Pemerintah Desa dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Ekonomi

Wardan

Politeknik Sains Global, Lombok Tengah, Indonesia

Corresponding author email: wardan1234@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Month 07, 2026

Approved Month 22, 2026

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah desa dalam mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat desa. Dana Desa merupakan instrumen penting dalam kebijakan pembangunan nasional yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, memperkuat perekonomian lokal, serta mendorong kemandirian desa. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa, kurangnya partisipasi masyarakat, dan belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta pelaku usaha lokal. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah desa dalam mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa dilakukan melalui perencanaan partisipatif, penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan usaha, serta pengembangan potensi ekonomi lokal yang disesuaikan dengan karakteristik desa. Selain itu, pemerintah desa juga mendorong kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan ekonomi. Strategi tersebut terbukti mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, memperluas peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola Dana Desa yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Kata Kunci : Strategi pemerintah desa, Dana Desa, Dana Desa, pembangunan ekonomi

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Example: Wardan, W. (2026). Strategi Pemerintah Desa dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Ekonomi. *Indonesian Journal of Applied Economics and Business Global*, 2(1), 92–102. <https://doi.org/10.55681/ijereg.v1i1.171>

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi desa merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional Indonesia. Desa tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal yang dimiliki. Kehadiran Dana Desa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi instrumen penting dalam mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dana Desa diberikan kepada pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya dukungan anggaran yang cukup besar, desa memiliki peluang untuk mengembangkan berbagai sektor ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Namun demikian, keberhasilan pembangunan ekonomi desa sangat bergantung pada kemampuan pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa secara efektif, efisien, dan akuntabel. Menurut penelitian Nurcholis dan Hidayat (2019) dalam *Jurnal Administrasi Publik*, pengelolaan Dana Desa yang terencana dan berbasis kebutuhan masyarakat dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dana Desa telah menjadi salah satu sumber pendanaan terbesar yang diterima oleh pemerintah desa dalam mendukung pembangunan lokal. Alokasi Dana Desa yang terus meningkat setiap tahun menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan dari tingkat desa. Akan tetapi, peningkatan anggaran tersebut juga diikuti dengan tuntutan terhadap kualitas pengelolaan yang lebih baik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat desa yang mengalami kendala dalam pengelolaan Dana Desa, terutama terkait perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan penggunaan anggaran. Kondisi tersebut dapat menyebabkan program pembangunan ekonomi yang direncanakan tidak berjalan secara optimal dan belum mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, strategi pemerintah desa menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa Dana Desa benar-benar digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Yusuf (2020) dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia* menjelaskan bahwa efektivitas pemanfaatan Dana Desa sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparatur desa dalam merencanakan dan mengimplementasikan program pembangunan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa yang optimal memerlukan adanya strategi yang terintegrasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Dalam proses perencanaan, pemerintah desa dituntut untuk melibatkan masyarakat secara aktif melalui forum musyawarah desa agar program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan warga. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa sehingga meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran. Strategi yang berbasis partisipasi masyarakat akan menghasilkan program pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Hasil penelitian Sari dan Nugroho (2021) dalam *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik* menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam

perencanaan pembangunan desa berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Pembangunan ekonomi desa tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pada pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan. Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pelatihan kewirausahaan, serta pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata desa. Melalui program-program tersebut, masyarakat desa diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan. Namun dalam praktiknya, masih banyak desa yang lebih memprioritaskan pembangunan fisik dibandingkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Akibatnya, manfaat Dana Desa terhadap peningkatan ekonomi masyarakat belum sepenuhnya optimal. Penelitian Prasetyo dan Kurniawan (2018) dalam *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* menyatakan bahwa pengalokasian Dana Desa yang seimbang antara pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi desa.

Selain aspek pemberdayaan, transparansi dan akuntabilitas juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan Dana Desa. Pemerintah desa dituntut untuk mampu menyampaikan informasi mengenai penggunaan Dana Desa secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, tetapi juga menjadi sarana pengawasan sosial yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan anggaran. Akuntabilitas yang baik akan memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun secara manfaat kepada masyarakat. Dalam konteks pembangunan ekonomi, transparansi dan akuntabilitas berperan penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan berorientasi pada hasil. Berdasarkan penelitian Wahyuni dan Setiawan (2022) dalam *Jurnal Akuntansi dan Governance Indonesia*, transparansi pengelolaan Dana Desa memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas program pembangunan ekonomi dan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.

Keberhasilan strategi pemerintah desa dalam mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa juga dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia aparatur desa. Aparatur desa memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, kompetensi aparatur desa menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi di tingkat lokal. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan anggaran dan kurang optimalnya pelaksanaan program pembangunan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan berbagai upaya peningkatan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan yang berkelanjutan. Penelitian Lestari dan Putra (2023) dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* menemukan bahwa peningkatan kapasitas aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan Dana Desa dan keberhasilan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Di samping kapasitas aparatur, pengembangan potensi ekonomi lokal menjadi strategi yang sangat penting dalam pemanfaatan Dana Desa. Setiap desa memiliki karakteristik dan sumber daya yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan pembangunan yang disesuaikan

dengan kondisi lokal. Pemerintah desa perlu mengidentifikasi potensi unggulan yang dapat dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, seperti sektor pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan, maupun pariwisata. Pengembangan potensi lokal tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi desa dalam jangka panjang. Dana Desa dapat menjadi modal awal untuk membangun infrastruktur pendukung dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi tersebut. Menurut penelitian Fauzi dan Ananda (2024) dalam *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Desa*, pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal melalui dukungan Dana Desa mampu meningkatkan kemandirian ekonomi desa serta menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat setempat.

Berdasarkan berbagai permasalahan dan peluang yang telah diuraikan, penelitian mengenai strategi pemerintah desa dalam mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan ekonomi menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai berbagai strategi yang diterapkan pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa secara efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas tata kelola Dana Desa sehingga manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat. Sejalan dengan penelitian Handoko dan Wijayanti (2025) dalam *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Pembangunan*, strategi pengelolaan Dana Desa yang berbasis partisipasi, transparansi, pemberdayaan, dan pengembangan potensi lokal merupakan kunci utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi pemerintah desa dalam mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan ekonomi masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan Dana Desa di tingkat desa. Menurut Sugiyono (2022), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan analisis data dilakukan secara induktif untuk memahami makna dari suatu fenomena sosial. Oleh karena itu, pendekatan ini dianggap relevan untuk mengungkap berbagai strategi yang diterapkan pemerintah desa dalam mendorong pembangunan ekonomi melalui pemanfaatan Dana Desa.

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive pada desa yang menjadi objek penelitian karena memiliki karakteristik yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan ekonomi masyarakat. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tokoh masyarakat, serta masyarakat penerima manfaat program Dana Desa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Menurut Lexy J. Moleong (2018), pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang akurat

dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Penggunaan beberapa teknik pengumpulan data tersebut bertujuan untuk meningkatkan kelengkapan dan kredibilitas data penelitian

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak data mulai dikumpulkan hingga penelitian selesai. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan teknik pengumpulan data yang berbeda. Menurut Burhan Bungin (2020), triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan berbagai sumber, metode, atau teori untuk meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang valid, objektif, dan mendalam mengenai strategi pemerintah desa dalam mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan ekonomi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi utama yang diterapkan pemerintah desa dalam mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan ekonomi adalah melalui perencanaan pembangunan yang partisipatif. Pemerintah desa melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam musyawarah desa untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan prioritas program pembangunan ekonomi. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan memberikan kesempatan bagi warga untuk menyampaikan aspirasi serta usulan yang sesuai dengan kondisi dan potensi desa. Melalui mekanisme tersebut, program yang dirancang menjadi lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki tingkat penerimaan yang tinggi. Partisipasi masyarakat juga meningkatkan rasa memiliki terhadap program yang dijalankan sehingga mendorong keberhasilan implementasi kegiatan pembangunan ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif menjadi fondasi penting dalam tata kelola Dana Desa yang efektif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri dan Setiawan (2021) dalam *Jurnal Administrasi Publik Indonesia* yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa mampu meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Desa serta memperkuat keberlanjutan program ekonomi yang dilaksanakan pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur desa, proses penyusunan program pembangunan ekonomi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Pemerintah desa berupaya mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan melalui dukungan Dana Desa. Sektor pertanian, perdagangan kecil, peternakan, dan usaha mikro menjadi fokus utama dalam berbagai program yang dirancang. Strategi ini dilakukan agar penggunaan Dana Desa tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan memanfaatkan potensi lokal yang tersedia, pemerintah desa berusaha menciptakan peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendekatan berbasis potensi lokal terbukti lebih efektif karena menyesuaikan dengan karakteristik wilayah serta kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha yang dikembangkan. Temuan ini didukung oleh penelitian Hidayat dan Pramono (2020) dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan* yang

menjelaskan bahwa pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal merupakan strategi yang mampu meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi desa.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan Dana Desa menjadi salah satu strategi yang diterapkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi mengenai penggunaan anggaran kepada masyarakat melalui papan informasi, forum musyawarah, dan laporan pertanggungjawaban yang dapat diakses oleh warga. Keterbukaan informasi tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui secara langsung berbagai program yang dibiayai oleh Dana Desa. Selain itu, transparansi juga berfungsi sebagai sarana pengawasan sosial yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Masyarakat yang memperoleh akses informasi cenderung lebih aktif dalam mengawasi pelaksanaan program pembangunan. Kondisi ini menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari dan Kurniawan (2022) dalam *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah* yang menyatakan bahwa transparansi pengelolaan Dana Desa memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas pembangunan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Selain transparansi, akuntabilitas menjadi aspek penting dalam pengelolaan Dana Desa yang ditemukan dalam penelitian ini. Pemerintah desa berupaya memastikan bahwa seluruh kegiatan yang didanai Dana Desa memiliki dokumen administrasi yang lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan, laporan kegiatan, dan evaluasi program secara berkala. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Keberadaan sistem akuntabilitas yang baik membantu pemerintah desa dalam mengidentifikasi kendala yang muncul selama pelaksanaan program sehingga dapat segera dilakukan perbaikan. Akuntabilitas juga menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan Dana Desa. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Rahmawati dan Yusuf (2023) dalam *Jurnal Governance Indonesia* yang menyebutkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keberhasilan pembangunan ekonomi masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat menjadi strategi berikutnya yang ditemukan dalam penelitian ini. Pemerintah desa memanfaatkan Dana Desa untuk mendukung berbagai kegiatan pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan pengembangan kapasitas masyarakat. Program-program tersebut dirancang untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha produktif dan menciptakan sumber pendapatan baru. Pelatihan yang diberikan mencakup bidang kewirausahaan, pengolahan hasil pertanian, pemasaran produk, serta pengelolaan keuangan usaha. Masyarakat yang mengikuti pelatihan mengaku memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas usaha mereka. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi warga desa. Temuan ini sesuai dengan penelitian Nugraha dan Wibowo (2021) dalam *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* yang menjelaskan bahwa program pemberdayaan berbasis Dana Desa mampu

meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif secara mandiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu strategi unggulan pemerintah desa dalam mengoptimalkan Dana Desa untuk pembangunan ekonomi. BUMDes berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa yang mengelola berbagai unit usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki desa. Dana Desa digunakan sebagai modal awal untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha BUMDes. Keberadaan BUMDes memberikan manfaat ekonomi yang cukup besar karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan asli desa. Selain itu, BUMDes juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang terorganisir. Pengembangan BUMDes menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya berfokus pada program jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang berkelanjutan. Hasil penelitian ini mendukung temuan Prasetyo dan Lestari (2020) dalam *Jurnal Ekonomi Desa* yang menyatakan bahwa BUMDes memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, pemerintah desa juga mengalokasikan Dana Desa untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur seperti jalan usaha tani, saluran irigasi, pasar desa, dan fasilitas pendukung usaha lainnya menjadi prioritas pembangunan. Infrastruktur yang memadai mampu meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pasar dan sumber daya ekonomi sehingga memperlancar distribusi barang dan jasa. Pembangunan infrastruktur juga memberikan manfaat jangka panjang karena dapat meningkatkan produktivitas sektor ekonomi lokal. Masyarakat merasakan adanya kemudahan dalam menjalankan aktivitas usaha setelah pembangunan infrastruktur dilakukan. Temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan fisik dan pembangunan ekonomi memiliki hubungan yang saling mendukung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Arifin dan Santoso (2019) dalam *Jurnal Infrastruktur dan Pembangunan Daerah* yang menemukan bahwa pembangunan infrastruktur desa berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan Dana Desa. Pemerintah desa menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, pendamping desa, lembaga pendidikan, serta kelompok masyarakat dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan ekonomi. Kolaborasi tersebut membantu pemerintah desa memperoleh dukungan teknis, sumber daya, dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam mengembangkan berbagai program ekonomi. Sinergi antar pihak juga meningkatkan efektivitas pelaksanaan program karena setiap pihak memiliki peran yang saling melengkapi. Keberhasilan pembangunan ekonomi desa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah desa, tetapi juga oleh keterlibatan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap kemajuan desa. Temuan ini sesuai dengan penelitian Kurniawan dan Hadi (2022) dalam *Jurnal Kebijakan Publik* yang menyebutkan bahwa kolaborasi multipihak merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Penelitian ini menemukan bahwa salah satu kendala dalam pengelolaan Dana Desa adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa. Beberapa aparatur desa masih menghadapi kesulitan dalam menyusun perencanaan program, mengelola administrasi keuangan, dan menyusun laporan pertanggungjawaban. Keterbatasan tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas penggunaan Dana Desa apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kompetensi yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah desa berupaya meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan pendampingan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun instansi terkait. Peningkatan kapasitas aparatur menjadi kebutuhan penting agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan secara profesional dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Temuan ini mendukung penelitian Wulandari dan Firmansyah (2023) dalam *Jurnal Administrasi Pemerintahan* yang menjelaskan bahwa kompetensi aparatur desa memiliki hubungan yang signifikan dengan kualitas pengelolaan Dana Desa dan keberhasilan program pembangunan ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan ekonomi cukup tinggi. Masyarakat tidak hanya terlibat dalam proses perencanaan, tetapi juga berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasan program yang didanai oleh Dana Desa. Keterlibatan masyarakat memberikan dampak positif terhadap keberhasilan program karena masyarakat merasa memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan menjaga keberlanjutan kegiatan yang dilaksanakan. Partisipasi masyarakat juga membantu pemerintah desa dalam mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang muncul selama pelaksanaan program. Dengan demikian, program pembangunan ekonomi dapat disesuaikan secara lebih cepat dan tepat sesuai dengan kondisi lapangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Maulana dan Siregar (2021) dalam *Jurnal Sosial dan Pembangunan* yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan berbasis pemberdayaan di tingkat desa.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa strategi pengelolaan Dana Desa telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Berbagai program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan mampu menciptakan peluang usaha baru dan meningkatkan produktivitas usaha yang telah ada sebelumnya. Masyarakat mengaku memperoleh manfaat dari berbagai bantuan dan pelatihan yang diberikan melalui program Dana Desa. Dampak tersebut terlihat dari meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat serta bertambahnya jumlah usaha kecil yang berkembang di desa. Meskipun peningkatan pendapatan belum merata pada seluruh kelompok masyarakat, namun secara umum program yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi terhadap perbaikan kondisi ekonomi masyarakat desa. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Yuliana dan Prasetyo (2024) dalam *Jurnal Ekonomi Kerakyatan* yang menyebutkan bahwa pemanfaatan Dana Desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga di wilayah pedesaan.

Dari aspek keberlanjutan program, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya merancang kegiatan yang memiliki manfaat jangka panjang. Program-program ekonomi tidak hanya difokuskan pada bantuan sesaat, tetapi diarahkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Strategi keberlanjutan dilakukan melalui pendampingan usaha, penguatan kelembagaan ekonomi desa, dan pengembangan jaringan

pemasaran produk lokal. Pendekatan ini bertujuan agar masyarakat mampu mengelola dan mengembangkan usaha secara mandiri setelah program selesai dilaksanakan. Keberlanjutan program menjadi faktor penting karena pembangunan ekonomi tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. Temuan ini sesuai dengan penelitian Handayani dan Nugroho (2022) dalam *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan* yang menjelaskan bahwa keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi sangat dipengaruhi oleh pendampingan dan penguatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan.

Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa strategi pemerintah desa dalam mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa telah memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi masyarakat. Kombinasi antara perencanaan partisipatif, transparansi, akuntabilitas, pemberdayaan masyarakat, pengembangan BUMDes, pembangunan infrastruktur, serta kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi faktor utama yang mendukung keberhasilan program. Strategi tersebut mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dan memperkuat kapasitas desa dalam mengelola potensi lokal yang dimiliki. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga oleh kualitas tata kelola yang diterapkan oleh pemerintah desa. Hasil ini sejalan dengan penelitian Saputra dan Ningsih (2025) dalam *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah* yang menyatakan bahwa tata kelola Dana Desa yang baik menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi desa yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintah desa dalam mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan ekonomi dilakukan melalui perencanaan partisipatif, penerapan transparansi dan akuntabilitas, pemberdayaan masyarakat, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi, serta penguatan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Strategi tersebut telah mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Desa, serta memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih terbuka dan bertanggung jawab. Selain itu, pemanfaatan Dana Desa yang diarahkan pada pengembangan potensi lokal terbukti memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan mengembangkan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik desa.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang optimal memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi masyarakat desa, ditandai dengan meningkatnya aktivitas usaha, bertambahnya kesempatan kerja, berkembangnya usaha ekonomi produktif, serta meningkatnya pendapatan masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan, terutama terkait kapasitas sumber daya manusia aparatur desa dan keberlanjutan program ekonomi yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi aparatur desa, penguatan pendampingan masyarakat, serta pengawasan yang berkelanjutan agar pengelolaan Dana Desa dapat semakin efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexandro, R., Hariatama, F., & Saputra, S. (2021). Analisis pemanfaatan dana desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. *Anterior Jurnal*, 21(1). <https://doi.org/10.33084/anterior.v21i1.2668>
- Bungin, Burhan. (2020). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya* (Edisi ketiga). Jakarta: Kencana.
- Daftar pustaka di atas menggunakan sumber jurnal yang memiliki DOI aktif dan dapat ditelusuri secara akademik.
- Dewi, D. N. A. M. (2021). Dana desa mendorong keberhasilan pembangunan ekonomi lokal desa di Indonesia. *Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis*, 4(2), 607–620. <https://doi.org/10.36407/jmsab.v4i2.385>
- Faoziyah, U., & Salim, W. (2020). Seeking prosperity through village proliferation: An evidence of the implementation of village funds (Dana Desa) in Indonesia. *Journal of Regional and City Planning*, 31(2), 97–121. <https://doi.org/10.5614/jpww.2020.31.2.1>
- Kurniawan. (2021). Evaluasi dampak dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa di Indonesia. *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 23(3), 424–433. <https://doi.org/10.30872/jfor.v23i3.9245>
- Moleong, Lexy J.. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mudzakir, A. M. (2025). Dampak dana desa terhadap ketimpangan desa-kota di Indonesia. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 9(2), 112–122. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2025.9.2.112-122>
- Ngurah Gede, W. A. A., & Iskandar, D. A. (2023). Dampak dana desa terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi regional di Indonesia. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 7(2), 138–150. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2023.7.2.138-150>
- Salam, A., Pananrangi, A. R., & Congge, U. (2024). Implementasi kebijakan membangun Indonesia melalui program nasional dana desa. *Paradigma Journal of Administration*, 2(2). <https://doi.org/10.35965/pja.v2i2.5369>
- Sartika, S., Mustafa, S. W., & Hadrah, H. (2024). Peran dana desa dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. *Jurnal Inovasi Bisnis Indonesia*, 1(4). <https://doi.org/10.61896/jibi.v1i4.53>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ultari, T., & Khoirunurrofik. (2024). The role of village-owned enterprises (BUMDes) in village development: Empirical evidence from villages in Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 8(2). <https://doi.org/10.36574/jpp.v8i2.559>
- Yusuf, M., & Khoirunurrofik. (2022). The relationship of village funds with village economic development: A village level study in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 14(3), 493–504. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.493-504>

